

LAPORAN EVALUASI

---

**Rencana Tindak Pengendalian  
Risiko Operasional Dinas Pekerjaan Umum  
Tahun 2023**

Penetapan Nomor : 050 / / 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

## DAFTAR ISI

REVIEW RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS .....	1
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup .....	2
II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO OPERASIONAL DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2023 .....	3
A. Rencana Pengelolaan Risiko Operasional Dinas PU Tahun 2023 .....	3
B. Realisasi Pengelolaan Risiko Dinas PU Tahun 2023.....	6
C. Hambatan Pelaksanaan kegiatan .....	8
D. Monitoring Risiko dan RTP Dinas PU Tahun 2023 .....	8
E. Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Terhadap Risiko Kecurangan (FRA) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 8	
III. PENUTUP .....	10

## REVIEW RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan Negara / daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

#### B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Kepala BPKP nomor 05 Tahun 2021 tentang penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk mengelola risiko yang mendukung pencapaian tujuan pemerintah Daerah melalui identifikasi, analisis dan pengendalian risiko serta pemantauan aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Penyusunan laporan pengelolaan risiko bertujuan sebagai alat untuk memantau proses pengelolaan risiko Operasional selama Tahun 2023.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah pengelolaan risiko sasaran operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas selama Tahun 2023.

## **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO OPERASIONAL DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2023**

### **A. Rencana Pengelolaan Risiko Operasional Dinas PU Tahun 2023**

Pelaporan pengelolaan risiko Operasional Tahun 2023 bertujuan untuk mengetahui apakah risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis benar-benar terjadi dan apakah rencana pengendalian untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah efektif. Hal ini sangat penting sebagai bahan kajian untuk mengelola risiko Tahun 2023. Pelaporan dilakukan dengan pengisian form 8, 9 dan 10 pada dokumen RTP Tahun 2023.

Jumlah risiko yang teridentifikasi setelah dimutakhirkan sebanyak 7 risiko strategis dan 22 risiko operasional dengan jumlah risiko prioritas yang terpilih untuk disusun rencana tindak pengendaliannya sebanyak 7 RTP pada risiko strategis dan RTP pada 9 risiko operasional. Permutakhiran risiko dilakukan sebagai bentuk persiapan dalam penilaian maturitas SPIP, sehingga diperlukan untuk merevisi risiko dengan memasukkan risiko kemitraan dan kecurangan, serta dikaitkan dengan tema risiko pariwisata.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas selama tahun 2023 yang telah disusun pada form 7 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Rencana Tindak Pengendalian Atas Risiko Operasional Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas Tahun 2023**

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan	Pemantauan kondisi drainase dan potensi genangan; Penanganan Fisik merusakkan drainase	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan prioritas anggaran infrastruktur Drainase	Kepala Bidang Drainase dan jasa Konstruksi	Triwulan IV 2023
2	Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan.	Pembaharuan data rawan bencana	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan prioritas anggaran Infrastruktur Bangunan Pengaman SDA	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi	Triwulan IV 2023
3	Bangunan gedung pemerintah tidak terpelihara dengan baik	Pemantauan kondisi bangunan gedung	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Pembuatan SOP penilikan bangunan gedung	Kepala Bidang Penataan Bangunan	Triwulan IV 2023
4	Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan	Menyusunan Dokumen pengadaan Tanah jalan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Review Dokumen pengadaan Tanah yang gtersedia	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan	Triwulan IV 2023
5	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil	Optimalisasi database tenaga terampil konstruksi	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Pembuatan SOP; pengelolaan SI Pembinaan jasa konstruksi; Sosialisasi	Kepala Bidang Drainase dan jasa Konstruksi	Triwulan IV 2023
6	Masih terdapat akses jalan wisata yang kurang memadai (mendukung Aspek Destinasi Pariwisata)	Updating data kondisi Jalan dan Penyusunan Skala prioritas	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan/rekonstruksi jalan; Pemeliharaan Berkala Jalan; Pemeliharaan rutin Jalan	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan; Kepala Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan	Triwulan IV 2023

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
7	Kejadian kecurangan di lapangan oleh kurangnya kompetensi SDM konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan	Pembinaan SDM konstruksi	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan kompetensi / Komitmen dan Integritas SDM internal Dinas PU; Pembuatan SOP pelaksanaan pekerjaan Fisik;	Kepala Dinas PU; Kepala Bidang Drainase dan jasa Konstruksi; Kepala Bidang Teknis	Triwulan IV 2023
8	Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa.	Pembinaan Penyedia Jasa konstruksi	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembuatan SOP Pengadaan Barang dan Jasa; pengelolaan SI jasa konstruksi; Penguatan komitmen SDM internal Dinas PU	Kepala Bidang Drainase dan jasa Konstruksi; Kepala Bidang Teknis	Triwulan IV 2023
9	Pekerjaan tidak sesuai kontrak / ketentuan	Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi; Peningkatan kompetensi SDM Internal Dinas PU	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembuatan SOP pekerjaan Fisik; Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi; Peningkatan kompetensi SDM Internal Dinas PU	Kepala Bidang Drainase dan jasa Konstruksi; Kepala Bidang Teknis	Triwulan IV 2023

Sumber: Aplikasi MRI, 2023

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

## B. Realisasi Pengelolaan Risiko Dinas PU Tahun 2023

Dengan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang telah direncanakan tahun 2023 seperti pada tabel 1 di atas, terdapat beberapa perbedaan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan, namun kegiatan pengendalian tersebut masih mendukung kegiatan pengendalian yang direncanakan. Beberapa kegiatan pengendalian yang berbeda tersebut antara lain:

Tabel 2. 2. Perbedaan Rencana Kegiatan Pengendalian dengan Realisasi Kegiatan Pengendalian Risiko Dinas PU Tahun 2023

No	Rencana Kegiatan Pengendalian	Realisasi Kegiatan Pengendalian
1.	Pembuatan SOP penilikan bangunan gedung	Rapat pembahasan sudah dilakukan, namun SOP akan disusun pada tahun 2024
2.	Review Dokumen pengadaan Tanah yang tersedia	Rapat koordinasi sudah dilakukan, namun Review dokumen Pengadaan Tanah akan di jadwalkan ulang sesuai ketersediaan anggaran.



No	Rencana Kegiatan Pengendalian	Realisasi Kegiatan Pengendalian
3.	Pembuatan SOP; pengelolaan SI Pembinaan jasa konstruksi; Sosialisasi	Sosialisasi Pelatihan Telah dilaksanakan. Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi telah dilaksanakan. Sedangkan pembuatan SOP masih dalam proses pencarian rujukan yang sesuai dan akan diselesaikan pada tahun 2024.
4.	Peningkatan kompetensi / Komitmen dan Integritas SDM internal Dinas PU; Pembuatan SOP pelaksanaan pekerjaan Fisik;	Penguatan Komitmen SDM Internal Dinas PU telah dilakukan (Pakta Integritas), Pengelolaan SIPJAKON sudah berjalan, sedangkan penyelesaian SOP akan diselesaikan Tahun 2024
5.	Pembuatan SOP Pengadaan Barang dan Jasa; pengelolaan SI jasa konstruksi; Penguatan komitmen SDM internal Dinas PU	Penguatan Komitmen SDM Internal Dinas PU telah dilakukan (Pakta Integritas), Pengelolaan SIPJAKON sudah berjalan, sedangkan penyelesaian SOP akan diselesaikan Tahun 2024
6.	Pembuatan SOP pekerjaan Fisik; Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi; Peningkatan kompetensi SDM Internal Dinas PU	Pembinaan Penyedia Jasa sudah dilakukan, peningkatan SDM internal DPU Sudah dilakukan, sedangkan SOP dijadwalkan tersusun pada tahun 2024

Selama Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2023 terdapat beberapa risiko teridentifikasi yang terjadi, yaitu :

1. Bangunan gedung pemerintah tidak terpelihara dengan baik yang disebabkan Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik baru tercapai 61.9% sehingga berdampak pada Kerusakkan gedung meningkat. Adapun tindak pengendalian yang sudah dilakukan berupa Penanganan kerusakan, namun anggaran yang tersedia tidak mencukupi sedangkan pembuatan SOP penilikan bangunan gedung dijadwalkan ulang pada tahun 2024.
2. Masih terdapat akses jalan wisata yang kurang memadai (mendukung Aspek Destinasi Pariwisata) yang disebabkan masih adanya jalanan rusak, dan telah dilakukan tindak pengendalian berupa penanganan fisik pada akses jalan menuju Objek Wisata (al. Peningkatan Jalan Akses Wisata Karanglo - Cipendok, Peningkatan Jalan Baturraden - Serang).
3. Pekerjaan tidak sesuai kontrak / ketentuan karena Terdapat pekerjaan yang putus kontrak. Adapun tindak pengendalian yang sudah dilakukan adalah Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi, Peningkatan SDM Internal, sedangkan Pembuatan SOP pekerjaan Fisik akan dijadwalkan ulang pada tahun 2024

### **C. Hambatan Pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan pengendalian atas risiko yang telah disusun tidak terjadi hambatan/kendala yang berarti, meskipun dalam realisasinya terdapat beberapa kegiatan pengendalian yang berbeda dengan rencana kegiatannya dan perubahan realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian tersebut pada tahun 2023, serta terdapat kegiatan pengendalian yang tidak dilaksanakan di tahun 2023 karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian tersebut sangat besar dan keterbatasan waktu. Namun, tidak berdampak besar terhadap pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan pengendalian yang berubah, dan kegiatan pengendalian yang tidak dilakukan pada tahun 2023 direncanakan akan dilakukan pada tahun selanjutnya.

### **D. Monitoring Risiko dan RTP Dinas PU Tahun 2023**

Berdasarkan Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas nomor 700/081.PKPT/168/IRBAN.4/ST.037/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Laporan Hasil evaluasi RTP Tahun 2022 dan Review RR Tahun 2023 pada dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas dengan hasil bahwa RTP Tahun 2023 belum diformalkan dan masih dalam bentuk konsep. Selain itu, dalam konsep tersebut belum disusun sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan belum dilampiri dengan kelengkapan dokumen berupa Formulir 1 sampai dengan Formulir 10.

Adapun hasil simpulan LHE tersebut bahwa Secara umum proses penyusunan RR RTP Tahun 2023 pada Dinas PU belum sepenuhnya dilakukan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan masih terdapat kekurangan dan catatan yang perlu dicermati dan ditindaklanjuti untuk memperbaiki pengelolaan Risiko dan penyelenggaraan SPIP secara umum.

Sebagai tindak lanjut LHE tersebut maka Dinas PU telah menyusun dan memformalkan Dokumen RTP Tahun 2023 lengkap beserta lampiran formulir 1 sampai dengan formulir 10.

### **E. Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Terhadap Risiko Kecurangan (FRA) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023**

Berdasarkan Surat BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor PE.05.03/LHP-453/PW11/5.2/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) pada Pemerintah

Kabupaten Banyumas, dimana Dinas PU menjadi sample, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Uraian Hasil Penyusunan Profil Risiko Kecurangan

Berdasarkan proses identifikasi risiko fraud yang telah dilakukan pada tujuh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Banyumas, diperoleh hasil sebanyak 20 risiko fraud pada Inspektorat Daerah, 22 risiko fraud pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, 20 risiko fraud pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, **24 risiko fraud pada Dinas Pekerjaan Umum**, 23 risiko fraud pada Dinas Pendidikan, 20 risiko fraud pada Dinas Kesehatan, serta 15 risiko fraud pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sehingga jumlah risiko fraud teridentifikasi sebanyak 144 risiko fraud.

Sehingga Dinas PU memiliki Profil Risiko kecurangan tertinggi dibanding OPD sample yang lain.

2. Peta Risiko Kecurangan

Peta Risiko dalam penyusunan Profil Risiko Kecurangan pada Dinas PU disajikan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko 5x5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	0	0	0	0	0
	4	Sering Terjadi	0	0	0	0	0
	3	Kadang terjadi	0	0	0	4	2
	2	Jarang Terjadi	0	0	0	6	10
	1	Hampir Tidak Pernah Terjadi	0	0	0	2	0

### III. PENUTUP

Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan pengelolaan risiko operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 sudah dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan hasil monitoring kegiatan pengkomunikasian risiko/RTP (Form 8), kegiatan pemantauan terhadap RTP (Form 9), dan keterjadian risiko (Form 10) menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun terdapat beberapa RTP yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan keterjadian risiko masih terjadi yang disebabkan oleh kegiatan pengendalian yang tidak dilaksanakan dan kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah disusun.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas harus terus melakukan monitoring pengelolaan risiko periode selanjutnya secara lebih intensif dan berkala dengan lebih baik lagi agar tidak terjadi risiko yang mengganggu pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, serta berkoordinasi dengan Unit Pemilik Risiko (UPR) pada masing-masing bidang dalam pengelolaan risiko operasional maupun operasional OPD dengan lebih baik lagi.

**Purwokerto, 10 Januari 2024**

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum**

**Kabupaten Banyumas**



**KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST, M.Si.**  
**NIP. 19671229 199002 1 002**

## Lampiran I

Tabel Informasi dan Komunikasi Risiko dan RTP Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan				Realisasi Waktu Pelaksanaan				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e	f				g				h
1	Penyusunan prioritas anggaran infrastruktur Drainase	Rapat Koordinasi	DPU, UPTD DPU, BAPPEDALITBANG, BKAD.	DPU, UPTD DPU	Triwulan IV Tahun 2023							Triwulan IV	Penyusunan Prioritas anggaran telah dilakukan sesuai ketersediaan anggaran pada perubahan APBD.
2	Penyusunan prioritas anggaran Infrastruktur Bangunan Pengaman SDA	Rapat Koordinasi, Grup WA Dinas PU; Bangunan Pengaman SDA	DPU, UPTD DPU, BAPPEDALITBANG, BKAD.	DPU, UPTD DPU	Triwulan IV Tahun 2023							Himbauan Cuaca Ekstrem	Penyusunan Prioritas anggaran telah dilakukan sesuai ketersediaan anggaran pada perubahan APBD.
3	Pembuatan SOP penilikan bangunan gedung	Rapat Koordinasi; SOP Penilikan Bangunan Gedung	DPU, Bidang Penataan Bangunan	DPU, Bidang Penataan Bangunan	Triwulan IV Tahun 2023							Triwulan IV	Rapat pembahasan sudah dilakukan, namun SOP akan disusun pada tahun 2024
4	Review Dokumen pengadaan Tanah yang tersedia	Rapat Koordinasi; Dokumen Pengadaan Tanah	DPU, Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan	DPU, Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan, Masyarakat	Triwulan IV Tahun 2023							TW IV	Rapat koordinasi sudah dilakukan, namun Review dokumen Pengadaan Tanah akan di jadwalkan ulang sesuai ketersediaan anggaran.
5	Pembuatan SOP; pengelolaan SI Pembinaan jasa konstruksi; Sosialisasi	Rapat Koordinasi; SOP Pembinaan jasa Konstruksi	DPU, Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi	DPU, Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi, Tenaga Terampil Konstruksi	Triwulan IV Tahun 2023							TW 3 Sertifikasi Tenaga Terampil	Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi telah dilaksanakan. Sedangkan pembuatan SOP masih dalam proses pencarian rujukan yang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan				Realisasi Waktu Pelaksanaan				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e	f				g				h
													sesuai dan akan diselesaikan pada tahun 2024.
6	Peningkatan/rekonstruksi jalan; Pemeliharaan Berkala Jalan; Pemeliharaan rutin Jalan	Rapat koordinasi; Surat; WA Grup Dinas	Dinas PU; Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan; Penyedia jasa	Dinas PU; Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan; Masyarakat					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahap Perencanaan s/d Pemantauan pekerjaan fisik telah dilaksanakan pada akses jalan menuju Objek Wisata (al. Peningkatan Jalan Akses Wisata Karanglo - Cipendok, Peningkatan Jalan Baturraden - Serang)
7	Peningkatan kompetensi / Komitmen dan Integritas SDM internal Dinas PU; Pembuatan SOP pelaksanaan pekerjaan Fisik;	Rapat koordinasi; Surat; WA Grup Dinas	Dinas PU; Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi	Dinas PU; Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi; Penyedia Jasa			TW 3 Pembinaan		TW 1 Penanganan Pakta Integritas		TW 3 Sertifikasi Tenaga Terampil		Penguatan Komitmen SDM Internal DPU Sudah dilakukan (Pakta Integritas). Peningkatan Kompetensi sudah dilakukan (Pelatihan)
8	Pembuatan SOP Pengadaan Barang dan Jasa; pengelolaan SI jasa konstruksi; Penguatan komitmen SDM internal Dinas PU	Rapat Koordinasi; Grup WA; Sosialisasi/pembinaan	Dinas PU; Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi; Penyedia Jasa Konstruksi	Dinas PU; Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi; Penyedia Jasa Konstruksi								Triwulan IV	Pengelolaan SI Jasa konstruksi (SIPJAKI) sudah berjalan. Penguatan Komitmen SDM Internal DPU Sudah dilakukan (Pakta Integritas).

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan				Realisasi Waktu Pelaksanaan				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e	f				g				h
9	Pembuatan SOP pekerjaan Fisik; Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi; Peningkatan kompetensi SDM Internal Dinas PU	Rapat koordinasi; Surat Teguran; WA Grup; Dokumen Administrasi Lapangan	Dinas PU; Bidang Teknis; Penyedia Jasa	Dinas Pu; Bidang teknis; Penyedia Jasa	Rapat Koordinasi				TW1 Pelatihan SDM Jasa Konstruksi				Pembinaan Penyedia Jasa sudah dilakukan, peningkatan SDM internal DPU Sudah dilakukan, sedangkan SOP dijadwalkan tersusun pada tahun 2024

## Lampiran II

Tabel Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan				Realisasi Waktu Pemantauan				Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e				f				g
1	Penyusunan prioritas anggaran infrastruktur Drainase	Rapat koordinasi, Usulan Renja, Penyusunan Renja	Kepala Bidang Drainase dan Jasa konstruksi	Triwulan 1, 2, 3, 4 Tahun 2023						TW III	TW IV	Penyusunan Prioritas anggaran telah dilakukan sesuai ketersediaan anggaran pada perubahan APBD.
2	Penyusunan prioritas anggaran Infrastruktur Bangunan Pengaman SDA	Rapat koordinasi, Usulan Renja, Penyusunan Renja	Kepala Bidang SDA dan Irigasi	Triwulan 1, 2, 3, 4 Tahun 2023						TW III	TW IV	Penyusunan Prioritas anggaran telah dilakukan sesuai ketersediaan anggaran pada perubahan APBD.
3	Pembuatan SOP penilikan bangunan gedung	Rapat koordinasi	Kepala Bidang Penataan Bangunan	Triwulan 1, 2, 3, 4							TW IV	Rapat pembahasan sudah dilakukan, namun SOP akan disusun pada tahun 2024



No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan				Realisasi Waktu Pemantauan				Keterangan	
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
a	b	c	d	e				f				g	
4	Review Dokumen pengadaan Tanah yang gtersedia	Rapat koordinasi, Pembentukan Tim	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan	Triwulan 1, 2, 3, 4 Tahun 2023								TW IV	Rapat koordinasi sudah dilakukan, namun Review dokumen Pengadaan Tanah akan di jadwalkan ulang sesuai ketersediaan anggaran.
5	Pembuatan SOP; pengelolaan SI Pembinaan jasa konstruksi; Sosialisasi	Rapat Koordinasi, pembuatan aplikasi / database	Kepala Bidang Drainase dan Jasa konstruksi	Triwulan 1, 2, 3, 4 Tahun 2023					TW I	TW II	TW III	TW IV	Sosialisasi Pelatihan Telah dilaksanakan. Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi telah dilaksanakan. Sedangkan pembuatan SOP masih dalam proses pencarian rujukan yang sesuai dan akan diselesaikan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan				Realisasi Waktu Pemantauan				Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e				f				g
												pada tahun 2024.
6	Peningkatan/rekonstruksi jalan; Pemeliharaan Berkala Jalan; Pemeliharaan rutin Jalan	Penanganan Fisik	Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan	Perencanaan	Persiapan / Pengadaan	Mulai Pelaksanaan Pekerjaan Fisik	Selesai Pekerjaan Fisik	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahap Perencanaan s/d Pemantauan pekerjaan fisik telah dilaksanakan pada akses jalan menuju Objek Wisata (al. Peningkatan Jalan Akses Wisata Karanglo - Cipendok, Peningkatan Jalan Baturraden - Serang)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan				Realisasi Waktu Pemantauan				Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e				f				g
7	Peningkatan kompetensi / Komitmen dan Integritas SDM internal Dinas PU; Pembuatan SOP pelaksanaan pekerjaan Fisik;	Pelatihan tenaga konstruksi	Bidang Drainasi dan Bina jasa Konstruksi	Perencanaan	Persiapan	Pelaksanaan	Pemantauan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Penguatan Komitmen SDM Internal Dinas PU telah dilakukan (Pakta Integritas), Pengelolaan SIPJAKON sudah berjalan, sedangkan penyelesaian SOP akan diselesaikan Tahun 2024
8	Pembuatan SOP Pengadaan Barang dan Jasa; pengelolaan SI jasa konstruksi; Penguatan komitmen SDM internal Dinas PU	Rapat Koordinasi; Pembuatan SOP	Kepala Dinas PU; Kepala Bidang teknis	Perencanaan	Persiapan	Pelaksanaan	Pemantauan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Penguatan Komitmen SDM Internal Dinas PU telah dilakukan (Pakta Integritas), Pengelolaan SIPJAKON sudah berjalan, sedangkan penyelesaian SOP akan diselesaikan Tahun 2024

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan				Realisasi Waktu Pemantauan				Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e				f				g
9	Pembuatan SOP pekerjaan Fisik; Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi; Peningkatan kompetensi SDM Internal Dinas PU	Rapat koordinasi; Pelatihan SDM Jasa Konstruksi;;	Kepala Dinas PU; kepala Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi	Perencanaan	Persiapan	Pelaksanaan	Pemantauan			TW III	TW IV	Pembinaan Penyedia Jasa sudah dilakukan, peningkatan SDM internal DPU Sudah dilakukan, sedangkan SOP dijadwalkan tersusun pada tahun 2024

## Lampiran III

Tabel Keterjadian Risiko Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Bangunan gedung pemerintah tidak terpelihara dengan baik	ROO.21.103.06.06	31/12/2023	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik baru tercapai 61.9%	Kerusakkan gedung meningkat		Pembuatan SOP penilikan bangunan gedung	Triwulan IV 2023	Penanganan kerusakan sudah dilakukan namun anggaran yang tersedia tidak mencukupi	
2	Kejadian kecurangan di lapangan oleh kurangnya kompetensi SDM konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan	ROO.21.103.06.06					Peningkatan kompetensi / Komitmen dan Integritas SDM internal Dinas PU; Pembuatan SOP pelaksanaan pekerjaan Fisik;	Triwulan IV 2023		
3	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil	ROO.21.103.06.06					Pembuatan SOP; pengelolaan SI Pembinaan jasa konstruksi; Sosialisasi	Triwulan IV 2023		
4	Masih terdapat akses jalan wisata yang kurang memadai (mendukung Aspek Destinasi Pariwisata)	ROO.21.103.06.06	31/12/2023	Masih terdapat akses jalan wisata dalam kondisi rusak	Menurunnya tingkat kunjungan wisata		Peningkatan/rekonstruksi jalan; Pemeliharaan Berkala Jalan; Pemeliharaan rutin Jalan	Triwulan IV 2023	TW 4	Penanganan jalan telah dilakukan pada beberapa ruas akses jalan wisata

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
5	Pekerjaan tidak sesuai kontrak / ketentuan	ROO.21.103.06.06	31/12/2023	Terdapat pekerjaan yang putus kontrak	Kerugian negara		Pembuatan SOP pekerjaan Fisik; Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi; Peningkatan kompetensi SDM Internal Dinas PU	Triwulan IV 2023	TW 1, 2, 3, 4	Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi telah dilakukan, Peningkatan SDM Internal telah dilakukan, Pembuatan SOP pekerjaan Fisik akan dijadwalkan ulang pada tahun 2024
6	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan	ROO.21.103.06.06					Penyusunan prioritas anggaran infrastruktur Drainase	Triwulan IV 2023		
7	Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa.	ROO.21.103.06.06					Pembuatan SOP Pengadaan Barang dan Jasa; pengelolaan SI jasa konstruksi; Penguatan komitmen SDM internal Dinas PU	Triwulan IV 2023		
8	Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan/ peningkatan jalan	ROO.21.103.06.06					Review Dokumen pengadaan Tanah yang gtersedia	Triwulan IV 2023		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
9	Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan.	ROO.21.103.06.06					Penyusunan prioritas anggaran Infrastruktur Bangunan Pengaman SDA	Triwulan IV 2023		